

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan adalah keadaan yang diinginkan oleh semua orang, dimana terpenuhinya kebutuhan secara material, spiritual, dan kehidupan sosial. Sesuai dengan tujuan yang tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dari penjabaran pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dapat disimpulkan bahwa perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan pembangunan nasional secara merata guna mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yaitu kesejahteraan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di segala bidang guna mencapai tujuan tersebut.

Tingkat pembangunan dan pendidikan yang kurang merata sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Mengurangi kesenjangan antar daerah, mengurangi kesenjangan pendapatan di tingkat masyarakat, serta mengentaskan kemiskinan di setiap daerah di Indonesia merupakan upaya

dari tujuan pemerataan pembangunan. Sementara itu pemerataan pendidikan dapat diperluas bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

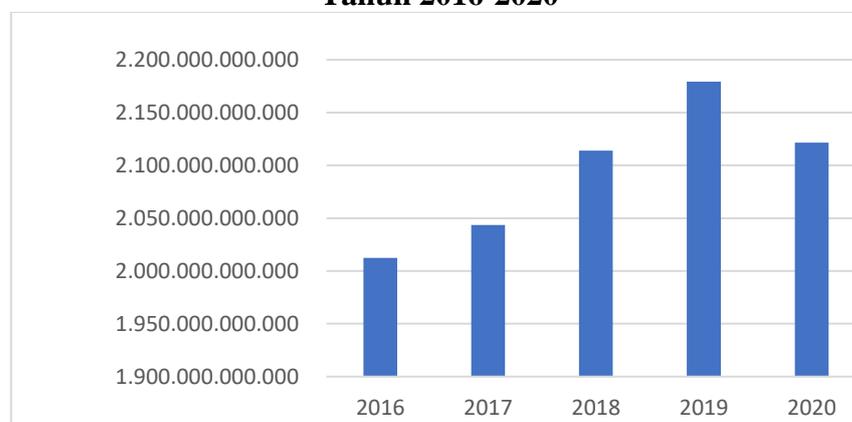
Sistem pemerintahan yang berubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 lalu disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan kembali pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah otonom untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Kebijakan yang telah diterapkan pada setiap daerah otonom dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan nasional di setiap daerah di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meminimalisir kontribusi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan tolok ukur

keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber pendapatan asli daerah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Memiliki berbagai sumber daya alam yang baik dan berpotensi menjadikan Kabupaten Karanganyar mendapatkan julukan “Bumi Intanpari”. Intanpari sendiri merupakan akronim dari industri, pertanian, dan pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar. Dengan tujuan dari ketiga aspek tersebut dapat menjadi sebuah penggerak dalam sektor perekonomian yang berjalan secara optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Karanganyar. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah memberikan kontribusi yang memadai terhadap penerimaan daerah khususnya Kabupaten Karanganyar.

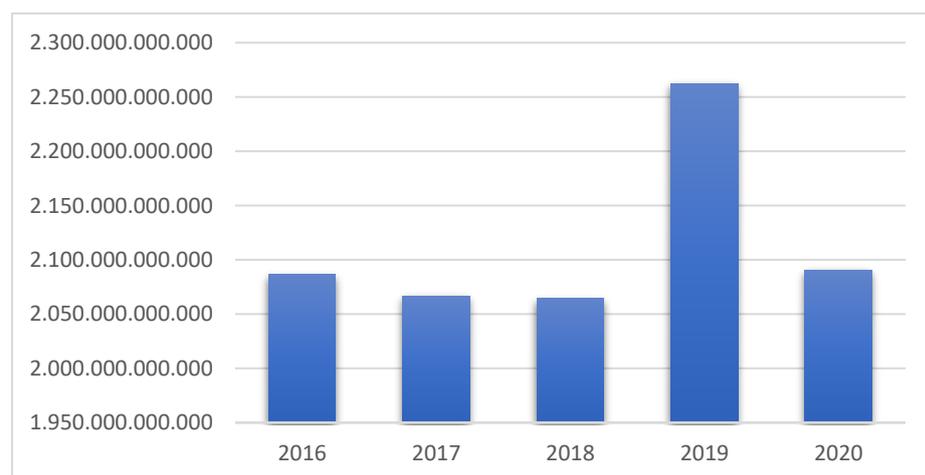
Gambar 1. 1.
Diagram Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kabupaten Karanganyar (data diolah)

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa selama tahun 5 tahun belakangan, sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 merupakan realisasi paling rendah dari anggaran tahun tersebut. Anggaran pendapatan yang semula sebesar Rp 2.016.208.038.000, hanya terealisasi sebesar Rp 2.012.335.065.180. Sedangkan pada tahun 2019 merupakan pendapatan tertinggi dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 2.158.492.615.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.179.409.706.710. Realisasi pendapatan daerah terus meningkat selama tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan potensi sumber daya dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Gambar 1. 2.
Diagram Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar (data diolah)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

pengelompokan anggaran belanja daerah terdiri dari belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung, meliputi:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa; dan
3. belanja modal.

Berikut yang termasuk dalam belanja tidak langsung:

1. belanja gaji pegawai;
2. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
3. belanja penerimaan lainnya, pimpinan, dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
4. biaya pemungutan Pajak Daerah; dan
5. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Gambar 1.2. menunjukkan fluktuasi realisasi belanja Kabupaten Karanganyar yang terjadi pada rentan tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 anggaran belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp 2.086.307.677.600, tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 2.066.524.668.105, tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp 2.064.581.557.575, tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp 2.262.135.688.098, dan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp 2.090.686.982.262. Grafik diatas menunjukkan realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar tertinggi diperoleh pada tahun 2019 dan paling rendah di peroleh pada tahun 2018.

Retribusi memiliki peran dan kontribusi yang dominan untuk menunjang pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

Tabel 1. 1.
Data PAD dan Retribusi Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah
2016	Rp 301.307.800.956	Rp 25.313.104.168
2017	Rp 415.142.563.370	Rp 24.068.314.297
2018	Rp 343.156.469.167	Rp 20.521.606.738
2019	Rp 387.763.013.239	Rp 10.952.823.841
2020	Rp 384.682.993.533	Rp 13.878.450.821

Sumber: BKD Kabupaten Karanganyar (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas data realisasi retribusi daerah mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp 10.952.823.841 menjadi Rp 13.878.450.821. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah

Kabupaten Karanganyar terjadi penurunan setiap tahunnya. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah memprediksikan penurunan pendapatan asli daerah yang terjadi pada tahun 2020 pada sektor pajak dan retribusi daerah yang mencapai Rp 16 miliar. Bertepatan dengan memasuki awal masa pandemi Covid-19 membuat pengusaha hotel, restoran, dan usaha-usaha lainnya kesulitan untuk membayarkan kewajibannya ke pemerintah. Penurunan potensi dari sektor pajak dan retribusi daerah membuat target perolehan tidak maksimal. Penerimaan retribusi daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jika penerimaan retribusi daerah rendah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan juga rendah. Tingkat efektivitas dapat diketahui apabila realisasi retribusi daerah melampaui target yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah diperoleh sehingga dapat menggambarkan kemampuan daerah berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Hasil penelitian Sutianingsih, Shinta Eka Kartika & Widowati (2020) dan Desy Karmila (2020) menemukan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Fluktuasi yang terjadi pada penerimaan retribusi akan mempengaruhi penerimaan PAD. Sehingga apabila penerimaan retribusi dibawah target maka penerimaan PAD juga mengalami penurunan. Sedangkan hasil penelitian Windi Yuniara & Rimi Gusliana Mais (2020) menemukan bahwa meningkatnya penerimaan retribusi daerah membuat PAD juga meningkat, namun jika hasil

perhitungan mencapai 40 persen baru dapat dikatakan berkontribusi dengan baik. Berbeda dari hasil penelitian Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, M. Husni Mubarak (2019) menemukan bahwa penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya berpengaruh signifikan terhadap PAD. Tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda yang berpengaruh kuat dalam penerimaan retribusi daerah.

Dengan demikian berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah, laju pertumbuhan dari masing-masing retribusi daerah dari periode ke periode selanjutnya, serta untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar tingkat efektivitas penerimaan hasil masing-masing retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020?

2. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan masing-masing retribusi daerah Kabupaten Karanganyar?
3. Berapa besar kontribusi masing-masing retribusi daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar efektivitas penerimaan hasil masing-masing retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan dari masing-masing retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar dari periode ke periode berikutnya.
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi masing-masing retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan di sektor pemerintahan terutama pada masalah pajak daerah khususnya retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pengaplikasian ilmu Akuntansi yang telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk menunjang persiapan terjun pada masyarakat sekitar di kemudian hari.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari penerimaan retribusi daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk pembelajaran serta dapat digunakan untuk bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.